

**ANALISIS KAUSALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENERIMAAN PAJAK
PROVINSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



OLEH:

RANGGA TRINALDI

NIM: 2016/16060106

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS KAUSALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENERIMAAN PAJAK
PROVINSI DI INDONESIA**

Nama : Rangga Trinaldi
Bp/Nim : 2016/16060106
Keahlian : Ekonomi Publik
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Melti Roza Adry, S.E, M.E
NIP. 19830505 200604 2 001

Disetujui oleh :
Pembimbing



Prof. Hasdi Aimon, M.Si
NIP. 19550505 197903 1 010



HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI




*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS KAUSALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN
PEMERINTAH DAN PENERIMAAN PAJAK PROVINSI DI INDONESIA**

Nama : Rangga Trinaldi
NIM/TM : 16060106/2016
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2021

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si	1. 
2	Anggota	: Drs. Zul Azhar, M.Si	2. 
3	Anggota	: Yolit Permata Putra, S. E,MSi	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rangga Trinaldi
NIM / Tahun Masuk : 16060106 / 2016
Tempat / Tanggal Lahir : Siliki / 04 Desember 1997
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jr. Koto Kociak VII Koto Talago, Kec. Guguak, Kab. Lima
Puluh Kota
No. HP / Telepon : 082283412660
Judul Skripsi : Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran
Pemerintah dan Penerimaan Pajak Provinsi di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 6 Mei 2020

nyatakan

Rangga Trinaldi
NIM. 16060106

ABSTRAK

Rangga Trinaldi (16060106/2016) : Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Penerimaan Pajak Provinsi di Indonesia, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Dibawah Bimbingan Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si

Penelitian ini berguna untuk mengetahui : (1) Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah provinsi di Indonesia. (2) Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak provinsi di Indonesia. (3) Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pajak provinsi di Indonesia.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2011 hingga tahun 2018. Penelitian ini menggunakan *model Panel Vector Auto Regression* (PVAR). Serta analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan induktif, dalam analisis induktif terdapat beberapa uji didalamnya yaitu : (1) Uji Akar Root, (2) Uji Kointegrasi, (3) Uji lag Optimum, (4) Uji Kausalitas Granger, (5) Uji Stabilitas, (6) Uji Respon Variabel, (7) Uji Kontribusi Variabel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah tetapi hanya memiliki hubungan satu arah yaitu dari pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah. (2) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak, namun hanya memiliki hubungan satu arah dari pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak bisa memiliki hubungan kausalitas apabila adanya campur dari variabel pengeluaran pemerintah. (3) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pajak tetapi hanya memiliki hubungan satu arah dari penerimaan pajak terhadap pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat menyarankan bagi pemerintah daerah agar lebih mengoptimalkan pengeluaran yang dilakukan serta mempertimbangkan kualitas dan kuantitas dalam mengeluarkan anggaran. Dan perlu adanya program yang mampu membuat masyarakat percaya dan sadar akan adanya wajib pajak, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia kedepannya. Serta pemerintah harus lebih gencar dalam mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi agar dapat mendongkrak penerimaan pajak serta pengeluaran pemerintah provinsi di Indonesia.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah SWT berkat, rahmat, taufik dan hidayah-nya, penyusunan skripsi yang berjudul “ Analisis pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak provinsi di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik.

Saya sangat menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini banyak mengalami berbagai kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak serta berkat rahmat Allah SWT sehingga kendala dan rintangan yang dihadapi dapat teratasi. Untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada bapak Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si, selaku pembimbing yang telah sabar, tulus dan ikhlas dalam memberikan bimbingan dan motivasi serta arahan yang sangat bernilai kepada saya selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada :

1. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Dewi Zaini Putri, SE, MM selaku sekretaris jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan penuh sabar mendengarkan keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak penguji skripsi Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, organisasi, dan bantuan moral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dalam penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Teristimewa kepada Bapak dan Ibu saya tercinta yaitu Afrialdi dan Amra Julita yang telah memberian doa dan tetesan keringatnya dalam menjadikan saya manusia yang sepatasnya. Serta dua bidadari keberuntungan saya yaitu Riska Purnama Sari dan Farzelli Putri Zona yang telah menjadi penyemangat dalam kehidupan saya.
9. Rekan – rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2016 tanpa terkecuali dan senior – senior Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah bersedia membantu dan memberi semangat serta motivasinya dalam penulisan skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang ikut berperan dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, saya sangat menyadari skripsi ini belum bisa dikatakan sempurna oleh sebab itu saya berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun agar tercapai kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. Dengan tulus saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang, Januari 2023

Penulis,

Rangga Trinaldi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II	16
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	16
A. Kajian Teori	16
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	16
2. Pengeluaran Pemerintah.....	18
3. Penerimaan Pajak	20
B. Hubungan Antar Variabel	21
1) Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah	21
2) Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak.....	23
3) Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak.....	24
C. Penelitian Relevan	25

D. Kerangka Konseptual.....	27
E. Hipotesis Penelitian	29
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Definisi Operasional	33
F. Teknik Analisis Data	34
1. Analisis Deskriptif.....	34
2. Analisis Induktif	36
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	42
1. Keadaan Geografis Indonesia	42
2. Keadaan Perekonomian Di Indonesia	43
B. Hasil Penelitian.....	44
1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	44
2. Analisis Induktif	55
3. Implementasi Model Panel Vektor Autoregression (VAR)	70
4. Pengujian Hipotesis	76

C. Pembahasan.....79

1. Hubungan Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengeluaran
Pemerintah provinsi di Indonesia79

2. Hubungan Kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Penerimaan Pajak
Provinsi di Indonesia82

3. Hubungan Kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak
Provinsi di Indonesia86

BAB V.....89

SIMPULAN DAN SARAN.....89

A. Simpulan.....89

B. Saran.....90

DAFTAR PUSTAKA91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2018.....	4
Tabel 1.2	Laju Pengeluaran Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2018.....	7
Tabel 1.3	Laju Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2018.....	10
Tabel 4.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2018.....	42
Tabel 4.2	Laju Pengeluaran Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2011-2018.....	46
Tabel 4.3	Laju Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2011-2018.....	49
Tabel 4.4	Uji Stasioner Variabel Pertumbuhan Ekonomi	52
Tabel 4.5	Uji Stasioner Variabel Pengeluaran Pemerintah	53
Tabel 4.6	Uji Stasioneritas Variabel Penerimaan Pajak.....	54
Tabel 4.7	Uji Kointegritas Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak	55
Tabel 4.8	Uji Lag Optimum.....	57
Tabel 4.9	Hasil Output Granger Causality Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak	58
Tabel 4.10	Estimasi Panel Vector Autoregression (PVAR) Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak	61

Tabel 4.11 Hasil Analisis Variance Decomposition Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak.....	69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2014-2018.....	2
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	26
Gambar 4.1	Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2014-2018.....	40
Gambar 4.2	Hasil Uji Stabilitas VAR.....	64
Gambar 4.3	Uji Impluse Response Function	66

BAB I

PENDAHULUAN

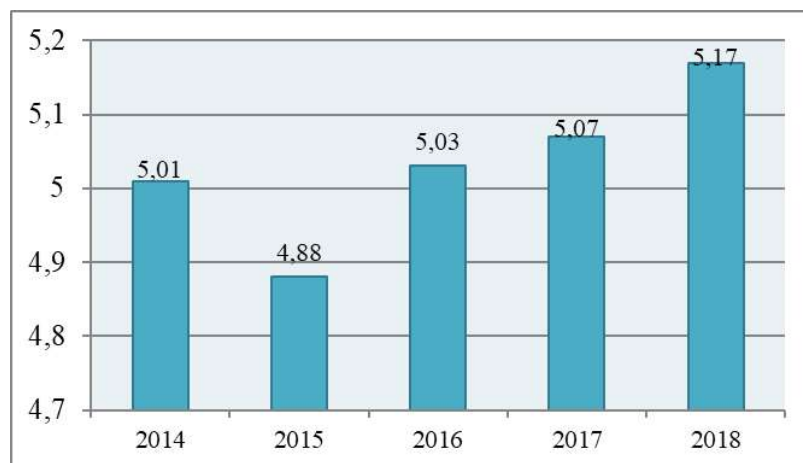
A. Latar Belakang Masalah

Dapat kita lihat setiap negara selalu berupaya melaksanakan pembangunan di negaranya masing-masing dengan harapan pembangunan yang dilakukan tersebut mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak karena kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama dari pemerintahan suatu negara termasuk juga negara Indonesia (Todaro, 2006)

Tetapi masalah yang sering muncul diberbagai negara dalam sisi perekonomian yaitu rendahnya angka pertumbuhan ekonomi terutama pada negara yang sedang berkembang yang mengakibatkan kesejahteraan rakyat dan keberhasilan ekonomi sulit untuk dicapai (Novela Hanifa, 2019)

Pertumbuhan ekonomi juga bisa dikatakan sebagai perluasan kegiatan pada suatu perekonomian yang akan berdampak terhadap peningkatan barang dan jasa yang di produksi masyarakat. Masalah pertumbuhan ekonomi ini dapat dikatakan masalah makro ekonomi jangka panjang. Apabila tingkat perekonomian yang sekarang lebih bagus dibandingkan periode sebelumnya berarti perekonomian itu dapat dikatakan baik (Sadano Sukirno, 2011)

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur bagi suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Begitupun bagi daerah atau sebuah provinsi dalam suatu negara. Tinggi rendah tingkat laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan kesejahteraan masyarakat. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan cenderung stabil, maka berarti tingkat kesejahteraan di daerah tersebut meningkat, sementara jika perekonomian menurun atau nilai pertumbuhan ekonomi negatif berarti kesejahteraan di daerah tersebut mengalami penurunan. Selain sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi juga dijadikan sebagai evaluasi hasil kerja pemerintah dan penentu bagus atau tidaknya kebijakan yang diambil pemerintah sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian. Berikut merupakan grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2014-2018.



Sumber : Badan Pusat statistik Indonesia, 2018)

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2014-2018

Dari grafik 1.1 diatas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami fluktuasi. Dimana dari tahun 2014

hingga tahun 2015 mengalami penurunan, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2016 sampai tahun 2018, namun peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu melebihi dari angka 5%. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu melebihi angka 5% yaitu karna kondisi perekonomian global yang berimbas ke perekonomian domestik. Indonesia belum menyiapkan industrialisasi, khususnya di sektor manufaktur, seiring adanya hantaman ekonomi global.

Selain produk domestik bruto (PDB) sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi di suatu negara, diwilayah daerah provinsi PDRB merupakan sebagai tolak ukur untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator dalam melihat pertumbuhan ekonomi regional atau daerah dalam suatu negara. Begitupun pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia dapat dilihat dari Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh provinsi yang ada di Indonesia. Dari laju PDRB provinsi Indonesia yang dihasilkan kita dapat melihat pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia pertahunnya. Berikut merupakan data laju PDRB di Indonesia tahun 2014-2018 :

**Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia
Tahun 2014-2018**

No	Provinsi	Laju PDRB Provinsi Indonesia %				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	1,55	-0,73	3,29	4,18	4,61
2	Sumatera Utara	5,23	5,10	5,18	5,12	5,18
3	Sumatera Barat	5,88	5,53	5,27	5,29	5,14
4	Riau	2,71	0,22	2,18	2,68	2,34
5	Jambi	7,36	4,21	4,37	4,64	4,71
6	Sumatera Selatan	4,79	4,42	5,04	5,51	6,04
7	Bengkulu	5,48	5,13	5,28	4,98	4,99
8	Lampung	5,08	5,13	5,14	5,16	5,25
9	Bangka Belitung	4,67	4,08	4,10	4,47	4,45
10	Kepulauan Riau	6,60	6,02	4,98	2,00	4,56
11	DKI Jakarta	5,91	5,91	5,87	6,20	6,17
12	Jawa Barat	5,09	5,05	5,66	5,35	5,64
13	Jawa Tengah	5,27	5,47	5,25	5,26	5,32
14	D I Yogyakarta	5,17	4,95	5,05	5,26	6,20
15	Jawa Timur	5,86	5,44	5,57	5,46	5,50
16	Banten	5,51	5,45	5,28	5,73	5,81
17	Bali	6,73	6,03	6,33	5,57	6,35
18	Nusa Tenggara Barat	5,17	21,76	5,81	0,12	-4,56
19	Nusa Tenggara Timur	5,05	4,92	5,12	5,11	5,13
20	Kalimantan Barat	5,03	4,88	5,20	5,17	5,06
21	Kalimantan Tengah	6,21	7,01	6,35	6,72	5,64
22	Kalimantan Selatan	4,84	3,82	4,40	5,28	5,13
23	Kalimantan Timur	1,71	-1,2	-0,38	3,13	2,67
24	Sulawesi Utara	6,31	6,12	6,16	6,31	6,01
25	Sulawesi Tengah	5,07	15,50	9,94	7,10	6,30
26	Sulawesi Selatan	7,54	7,19	7,42	7,21	7,07
27	Sulawesi Tenggara	6,26	6,88	6,51	6,76	6,42
28	Gorontalo	7,27	6,22	6,52	6,73	6,51
29	Sulawesi Barat	8,86	7,31	6,01	6,62	6,23
30	Maluku	6,64	5,48	5,73	5,82	5,94
31	Maluku Utara	5,49	6,10	5,77	7,67	7,92
32	Papua Barat	5,38	4,15	4,52	4,01	6,24
33	Papua	3,65	7,35	9,14	4,64	7,33

Sumber : Badan Pusat statistik Indonesia, (2018)

Tabel 1.1 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia yang mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada provinsi Sulawesi Barat yakni sebesar 8,86% dan terendah pada provinsi Aceh sebesar 1,55%. Sementara pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dialami oleh provinsi Nusa Tenggara Barat yakni sebesar 21,76% dan yang terendah pada provinsi Kalimantan Timur yakni hingga -1,20%. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan tertinggi terjadi di provinsi Papua yakni sebesar 9,14% dan terendah masih dialami oleh provinsi Kalimantan Timur yakni sebesar -0,38%. Pada 2017 laju pertumbuhan tertinggi terjadi di provinsi Maluku Utara yakni 7,67% dan terendah pada provinsi NTB yang hanya mencapai angka 0,12%. Dan pada 2018 laju pertumbuhan tertinggi kembali terjadi pada provinsi Maluku Utara yakni mencapai 7,92% dan yang terendah kembali dialami oleh provinsi NTB -4,56%. Dapat dimaknakan bahwa untuk menekan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlunya adanya dukungan dan kebijakan-kebijakan dari pihak pemerintah. Yakni dapat dialokasikan dengan mengeluarkan dan belanja pemerintah seperti penyediaan fasilitas kesehatan, bantuan sosial terhadap masyarakat miskin, membuka sektor-sektor terkait dengan keberhasilan industri. Adanya kesatuan pada pengeluaran pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi dapat lebih maju dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang maju dapat memberikan efek dan pengaruh fundamental pada pengeluaran pemerintah. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah menjadi suatu hal yang mendasar untuk dikaji karena secara umum, dengan adanya pengeluaran

pemerintah baik dalam bentuk fisik maupun modal manusia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Aliran Keynesian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi. Pandangan Keynesian menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang meningkat akan mendorong peningkatan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Linda, 1983). Namun dibantah oleh Wegner, Wegner menyatakan peningkatan ekonomilah yang mempengaruhi besarnya pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah telah menjadi perhatian dari banyak penelitian sebelumnya, dan menghasilkan dua pendapat yang berbeda tentang kedua variabel tersebut. Dari banyak perbedaan pendapat dan hasil penelitian tentang kedua teori ini memungkinkan adanya pendapat lain yang menyatakan bahwa kedua variabel tersebut saling berhubungan positif dan mendukung satu sama lainnya, hubungan positif antar dua variabel ini juga disebut dengan hubungan kausalitas atau timbal balik. Hal ini di perkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Wu et al., (2010), yang menggunakan sampel besar yaitu 182 negara. Dari hasil penelitian tersebut menemukan hasil bahwa terjadinya hubungan dua arah antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Berikut merupakan data laju pengeluaran pemerintah provinsi Indonesia tahun 2014-2018:

Tabel 1.2 Laju Pengeluaran Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2018

No	Provinsi	Laju Pengeluaran Pemerintah Provinsi Indonesia(%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	2,89	-3,03	0,33	17,07	4,33
2	Sumatera Utara	5,55	8,59	29,21	22,10	3,47
3	Sumatera Barat	13,18	11,62	12,71	30,51	5,23
4	Riau	6,80	13,66	-7,51	-8,22	11,67
5	Jambi	2,85	-2,04	-6,17	35,53	-1,49
6	Sumatera Selatan	4,31	-3,48	9,90	24,64	-16,47
7	Bengkulu	13,35	10,92	2,28	30,17	5,90
8	Lampung	16,35	7,25	16,18	23,31	16,10
9	Bangka Belitung	5,92	15,15	3,39	7,92	16,45
10	Kepulauan Riau	2,97	-23,37	7,65	23,57	1,98
11	DKI Jakarta	4,98	3,89	11,18	23,81	4,87
12	Jawa Barat	16,80	10,29	9,74	13,30	-4,37
13	Jawa Tengah	15,00	9,92	8,28	21,44	2,93
14	D I Yogyakarta	18,19	10,82	9,18	23,64	5,43
15	Jawa Timur	18,26	9,10	7,49	20,07	-3,40
16	Banten	21,81	13,49	5,96	4,89	10,69
17	Bali	12,16	4,56	0,85	9,37	2,86
18	Nusa Tenggara Barat	16,43	30,11	13,75	30,69	-1,98
19	Nusa Tenggara Timur	14,54	18,11	13,18	23,44	-0,38
20	Kalimantan Barat	10,42	9,36	7,03	23,51	0,65
21	Kalimantan Tengah	4,39	0,87	1,15	22,99	4,82
22	Kalimantan Selatan	1,83	-2,76	1,83	7,17	7,78
23	Kalimantan Timur	-16,82	-23,99	-12,41	6,74	-2,28
24	Sulawesi Utara	11,02	9,67	5,93	30,34	8,74
25	Sulawesi Tengah	13,48	17,36	7,10	14,00	-1,99
26	Sulawesi Selatan	16,45	9,80	13,67	26,44	5,20
27	Sulawesi Tenggara	15,82	14,53	12,94	23,71	-10,08
28	Gorontalo	12,81	13,43	11,95	10,72	-0,67
29	Sulawesi Barat	16,53	7,61	23,12	8,97	-2,60
30	Maluku	12,84	20,50	22,87	0,50	22,50
31	Maluku Utara	6,36	21,10	11,04	12,17	9,27
32	Papua Barat	18,08	5,77	-3,32	8,02	2,28
33	Papua	26,44	12,51	0,65	7,23	0,90

Sumber : Badan Pusat statistik Indonesia, 2018 (Data Olahan)

Pada Tabel 1.2 laju pengeluaran pemerintah provinsi-provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Jumlah laju pengeluaran pemerintah terendah berada pada tahun 2014 yakni terletak pada provinsi Kalimantan Timur yakni sebesar -16,82% dan tertinggi berada pada provinsi Papua yaitu sebesar 26,44%. Pada tahun 2015 provinsi yang mempunyai laju pengeluaran pemerintah tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat yakni sebesar 30,11% dan yang terendah masih pada provinsi Kalimantan Timur sebesar -23,99%. Selanjutnya pada tahun 2016 laju pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi di provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 29,21% dan yang terendah kembali dialami oleh provinsi Kalimantan Timur yakni sebesar -12,41% hal itu disebabkan oleh anggaran pendapatan dan belanja Kalimantan Timur mengalami penurunan anggaran. Dan 2017 laju pengeluaran pemerintah provinsi Indonesia mengalami kenaikan yang cukup tinggi disetiap provinsinya hal ini disebabkan karena mulai dikerjakannya proyek-proyek pemerintah seiring dengan meningkatnya belanja modal dan belanja barang, serta kenaikan tersebut juga diiringi oleh peningkatan belanja bagi hasil Kabupaten/Kota dan desa di Indonesia. Dan pada tahun 2018 laju pengeluaran pemerintah banyak mengalami penurunan disetiap provinsinya, provinsi yang mengalami penurunan terendah terjadi pada provinsi Sumatera Selatan yakni sebesar -16,47% dan provinsi yang mengalami laju tertinggi yaitu pada provinsi Maluku sebesar 22,50%. Dapat dimaknakan pengeluaran pemerintah sendiri adalah wujud dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan dan penerimaan negara untuk disalurkan atau dialokasikan pada program yang dirancang upaya kelangsungan dan keberhasilan

masyarakat. Dimana salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Salah satu usaha dari pemerintah meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan mengusakan pemerintah akan lebih selektif untuk memberikan insentif pajak dan mengoptimalkan pajak digital. Dengan besarnya sumber kas negara dengan melalui penerimaan pajak akan membantu pula alokasi pengeluaran pemerintah untuk program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas negara salah satunya dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, penyuluhan sosial, penyuluhan wajib bayar pajak. Sehingga kedua variabel tersebut dapat mempengaruhi satu sama lain.

Pengeluaran pemerintah masing-masing daerah sangat di tentukan oleh penerimaan atau pendapatan daerah tersebut. Tergantung bagaimana daerah tersebut dapat menggali potensi yang ada pada daerah nya masing-masing. pengeluaran pemerintah tidak seutuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemenuhan barang publik saja, tetapi digunakan juga untuk kebutuhan yang bersifat konsumsi serta dalam rangka pemeliharaan. Pengeluaran rutin mengambil peranan penting dalam menunjang kelancaran sistem pemerintahan serta dalam upaya peningkatan produktifitas, yang pada akhirnya akan membantu tercapainya tujuan sebuah negara dalam upaya mensejahterakan penduduknya.

Dalam teori Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa masyarakat dapat memaklumi kenapa pemerintah meminta pungutan pajak, masyarakat sangat menyadari bahwa negara membutuhkan dana untuk pengeluaran yang akan digunakan sebagai penunjang supaya tercapainya tujuan pemerintah dalam

bernegara (Mangkosoebroto, 1993). Menurut Taha dan Loganathan, dilakukan sebuah penelitian yang menunjukkan adanya hubungan jangka panjang dua arah antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Malaysia (Taha & Loganathan, 2008). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengurangi tingkat pajak dapat menyebabkan penurunan pengeluaran pemerintah di masa depannya dan sebaliknya. Berikut merupakan data laju penerimaan pajak daerah provinsi Indonesia tahun 2014-2018

**Tabel 1.3 Laju Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Di Indonesia
Tahun 2014-2018**

NO	Provinsi	Laju Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Indonesia (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	36,90	13,78	6,83	5,00	4,27
2	Sumatera Utara	10,02	9,19	0,43	8,48	8,11
3	Sumatera Barat	24,82	6,72	5,29	6,89	5,49
4	Riau	18,27	3,04	-6,02	13,95	16,27
5	Jambi	20,04	-0,02	-4,34	36,18	-3,30
6	Sumatera Selatan	20,46	2,52	-3,74	26,70	5,02
7	Bengkulu	22,73	5,57	3,07	13,55	18,55
8	Lampung	25,79	0,87	4,51	19,47	18,71
9	Bangka Belitung	13,59	-0,26	0,20	23,85	3,19
10	Kepulauan Riau	18,06	-5,42	0,08	2,98	8,42
11	DKI Jakarta	15,75	7,49	8,72	15,46	4,45
12	Jawa Barat	22,41	6,28	7,60	4,80	-1,58
13	Jawa Tengah	22,29	10,68	6,40	9,31	2,53
14	DI Yogyakarta	21,48	8,21	3,06	9,95	-3,66
15	Jawa Timur	22,46	8,50	2,20	12,36	-11,31
16	Banten	17,26	1,35	11,28	5,22	6,37
17	Bali	14,30	2,13	0,86	10,77	3,37
18	Nusa Tenggara Barat	29,66	11,70	-0,73	17,70	7,75
19	Nusa Tenggara Timur	53,91	18,38	12,50	9,21	1,08
20	Kalimantan Barat	18,93	8,64	-2,40	16,58	-8,47
21	Kalimantan Tengah	11,75	-6,29	-7,63	15,96	3,10
22	Kalimantan Selatan	12,12	-14,83	-8,49	19,52	26,36
23	Kalimantan Timur	10,13	-30,86	-16,69	12,10	-5,29
24	Sulawesi Utara	17,55	6,61	0,16	17,36	1,64
25	Sulawesi Tengah	19,56	11,36	5,05	1,82	-0,99
26	Sulawesi Selatan	18,36	8,81	6,11	5,26	6,40
27	Sulawesi Tenggara	12,19	12,81	12,26	5,90	-27,29
28	Gorontalo	23,03	5,61	7,51	10,36	6,84
29	Sulawesi Barat	48,25	15,90	8,39	5,08	8,79
30	Maluku	28,36	6,18	16,48	-4,82	6,91
31	Maluku Utara	5,57	18,78	19,42	16,90	1,06
32	Papua Barat	24,70	0,35	9,42	21,60	-8,86
33	Papua	24,77	11,89	5,30	13,45	0,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018 (Data Olahan)

Pada Tabel 1.3 laju penerimaan pajak daerah provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Pada tahun 2014 laju penerimaan pajak daerah provinsi Indonesia mengalami peningkatan disetiap provinsinya, provinsi yang mengalami peningkatan tertinggi berada pada provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 53,91%, Sementara itu yang terendah pada provinsi Maluku Utara sebesar 5,57%. Hal ini disebabkan karna adanya program pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, khususnya lembaga Direktorat Jendral Pajak Indonesia menerapkan sejumlah langkah untuk mendorong kepatuhan pajak: seperti pengadaan program sosialisasi dan penyuluhan, pelaksanaan amnesty pajak, peningkatan kualitas teknologi dan SDM serta ketegasan dalam penegakan hukum perpajakan. Dan pada tahun 2015 tingkat laju penerimaan pajak tertinggi berada pada provinsi Maluku Utara yakni sebesar 18,78% dan yang terendah pada provinsi Kalimantan Timur sebesar - 30,86%. Sementara itu pada tahun 2016 banyak provinsi-provinsi di Indonesia mengalami penurunan laju penerimaan pajak, hal ini disebabkan karena banyaknya PERDA di Indonesia yang menghambat masuknya investasi dan sulit perizinan, hal itu berdampak terhadap penurun PAD disuatu wilayah. Selanjutnya 2017 laju penerimaan pajak provinsi-provinsi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena pemerintah pada tahun 2016 membenahi PERDA dan membatalkan 3.143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dinilai bermasalah. Tujuan utamanya agar mendorong masuknya investasi. Dan 2018 laju penerimaan pajak

daerah di beberapa provinsi kembali mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena perekonomian yang melambat.

Penelitian ini memiliki variabel-variabel yang menunjang perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Variabel pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB masing-masing provinsi di Indonesia, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah diukur dari pengeluaran pemerintah masing-masing provinsi di Indonesia dan variabel penerimaan pajak diukur dari penerimaan pajak daerah masing-masing provinsi di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak provinsi di Indonesia. Karena ketiga variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian di suatu negara. Karena jika pertumbuhan ekonomi meningkat akan mendorong kenaikan penerimaan pajak, demikian juga sebaliknya. Begitu juga dengan penerimaan pajak, dengan adanya pajak pemerintah dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didukung dengan adanya kebijakan dan pengeluaran pemerintah yang mendorong perekonomian maju sebagai wujud instrumen peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan instrumen pajak. Sehingga penelitian ini akan penulis buat dengan judul : **“Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Dan Penerimaan Pajak Provinsi Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah provinsi di Indonesia ?
2. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak provinsi di Indonesia ?
3. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pajak provinsi di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis :

1. Hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah provinsi di Indonesia.
2. Hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak provinsi di Indonesia.
3. Hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pajak provinsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang penelitian ilmiah.

b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Bagi penelitian lain yang melakukan penelitian pada tema dan masalah yang sama, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam meneliti. Penulis juga berharap tulisan ini dapat berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta masukan bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan agar dapat lebih cermat dalam melihat kondisi dan perkembangan penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia.